SEJARAH KOTA DUMAI

1979-2005

SKRIPSI

Diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Sastra Universitas Andalas
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Sejarah

Oleh :

RINI MULIYA SARI
03 181 028

JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **"Sejarah Kota Dumai 1979-2005"**. Pemilihan tahun 1979 untk melihat perkembangan Kota Dumai sejak diresmikannya sebagai Kota administratif sampai menjadi pemerintahan kota (1999), karena pada tahun inilah dimulainya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang otonomi daerah, sehingga melahirkan tuntutan guna menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan daerah, yang berimbas pada perubahan status Pemerintahan Dumai dari kota administratif menjadi kota. Tahun 2005 diambil sebagai batasan akhir karena penulisan ini memfokuskan pada perkembangan Dumai pada masa kepemimpinan H. Wan Syamsir Yus. Sungguhpun demikian, penulisan Kota Dumai ini juga melihat periode sebelumnya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu pencarian dan pengumpulan sumber dan bahan *(heuristik)*, pengujian dan analisa terhadap sumber yang digunakan *(kritik)*, *interpretasi*, dan penulisan *(historiografi)*. Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber primer, yang diperoleh melalui studi kearsipan dan wawancara dengan metode sejarah lisan.

Kota Dumai pada mulanya merupakan sebuah dusun kecil yang terletak di pinggir pantai yang hanya dihuni oleh beberapa orang nelayan. Penduduk Dumai mulai bertambah pada saat masuknya Jepang ke Dumai tahun 1942. Namun, perkembangan sejarah Dumai mulai pesat sejak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) memindahkan pelabuhannya dari Sungai Pakning ke Dumai. Keberadaan Caltex ini membawa perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Kota Dumai. Perkampungan nelayan itu kemudian berubah menjadi kota yang didatangi para perantau yang berasal dari daerah luar, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa, dan lain sebagainya, sehingga terciptalah keberagaman (heterogenitas) di Kota Dumai.

Keberadaan Caltex tersebut juga membawa perubahan bagi mata pencaharian penduduk setempat yakni dari nelayan menjadi buruh dan pegawai Caltex. Seiring dengan itu terjadi pula perluasan wilayah Kota Dumai, yang juga diiringi dengan perkembangan fungsi Kota Dumai. Tidak hanya menjadi "kota minyak", tetapi juga menjadi pusat pendidikan, perekonomian, dan pariwisata.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ketimpangan dan kecemburuan sosial serta konflik yang bermuara kepada disintegrasi, maka didirikanlah Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) yang terdiri dari 15 etnis. Semua permasalahan yang menyangkut konflik suku, ras dan agama serta permasalahan sosial lainnya dimufakatkan di dalam LKKMD tersebut, sehingga konflik yang berkembang dapat diminimalisir secepat mungkin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Dumai pada mulanya merupakan sebuah dusun kecil yang hanya dihuni oleh beberapa nelayan di pinggir pantai. Menurut cerita rakyat, Dumai berasal dari kata "damai", yang artinya kedamaian penduduk asli dengan tentara Aceh yang pernah menyerang ke wilayah itu.[1] Penduduk itu merupakan peladang yang berpindah dari Batu Panjang Kecamatan Rupat, mereka berladang dan membangun pondok-pondok kecil sebagai tempat tinggal. Daerah Dumai yang pertama kali di huni oleh penduduk yaitu di sekitar Pangkalan Sesai.[2] Pada tahun 1920 dusun Dumai berada di bawah pemerintahan Kepala Desa (penghulu) Batu Panjang yang bernama Encik Ismail.[3]

Pada masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942, kaum romusha dari Jawa didatangkan pemerintah ke Dumai untuk memasang pipa air yang memanjang dari Duri ke Dumai. Pipa itu mengalirkan air dari Duri ke Dumai yang akan diuji muatan minyak dalam air tersebut dan membuat jalan (rel) kereta api. Pemerintah pendudukan Jepang membangun pelabuhan Dumai pada tahun 1943 dengan maksud

---

[1] Nazar Dahlan, *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 1979), hal. 43.

[2] *Ibid.*, hal. 20.

[3] *Ibid.*, hal. 23.

untuk mengalirkan minyak dari daerah Duri ke kapal-kapal tanki yang telah disediakan di pelabuhan tersebut.[4]

Pada akhir bulan Agustus 1945, di daerah Riau tersebar berita tentang penyerahan tanpa syarat bala tentara Jepang kepada pasukan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yaitu setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasuki oleh tentara Sekutu.[5] Setelah proklamasi kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, usaha eksploitasi Jepang terhadap minyak bumi diteruskan oleh PT. CPI (Caltex Pacific Indonesia) yang pada mulanya bernama PT. Socal Indonesia. Usaha itu berhasil menemukan sumber-sumber minyak, karena itu pelabuhan Dumai difungsikan untuk penyaluran minyak tersebut.[6]

Dumai semakin berkembang semenjak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) memindahkan pelabuhannya dari Sungai Pakning ke Dumai. Pada tahun 1952 dibangunlah jalan tembus dari daerah penghasil minyak di Kabupaten Bengkalis, tepatnya dari daerah Duri menuju Dumai. Pipa-pipa raksasa untuk mengalirkan minyak mentah dibangun sepanjang 200 km dengan posisi memanjang di tepi jalan raya. Pada tahun 1959, pelabuhan minyak selesai didirikan dan mulai digunakan. Melihat perkembangan positif yang terjadi, Pertamina UP (Unit Pengolahan) II pun memanfaatkan wilayah sekitar pelabuhan sebagai lokasi pengilangan minyak, yang dinamakan Kilang Minyak Putri Tujuh.[7]

---

[4] *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*, hal. 3.

[5] Ahmad Yusuf, dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942, Jilid 1* (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004), hal. 129.

[6] *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*, hal. 6.

[7] Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004), hal. 23.

BAB IV

KESIMPULAN

Penduduk Dumai mulai meningkat jumlahnya ketika Pemerintahan Jepang mendatangkan para romusha yang berasal dari Jawa untuk membangun jalur kereta api dari Dumai ke Pekanbaru yang berjarak 204 km. Daerah Dumai mulai mengalami perkembangan sejak Caltex menjadikan Dumai sebagai daerah pelabuhan minyaknya (1959). Beberapa tahun kemudian (1964) Dumai dijadikan sebagai kecamatan. Perkembangan Pemerintahan Dumai terjadi pada tahun 1979 ketika Dumai berubah menjadi kota administratif. Setelah 20 tahun kemudian, pertumbuhan dan perkembangan Kota Dumai semakin meningkat sehingga Pemerintahan Dumai berubah dari kota administratif menjadi pemerintahan kota. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 27 April 1999 diresmikan Dumai sebagai Pemerintahan Kota.

Penduduk Dumai bersifat heterogen yakni terdiri dari berbagai etnis, antara lain Melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan ada juga penduduk Asia lainnya yaitu Cina dan India. Di samping itu, ada juga orang Eropa dan Amerika Serikat yang bekerja di Caltex. Penduduk yang mayoritas di dalam wilayah Kota Dumai adalah etnis Melayu, yang merupakan penduduk asli Kota Dumai.

Perkembangan Kota Dumai sebagai daerah pelabuhan minyak Caltex menyebabkan adanya keberagaman pekerjaan. Para pekerja yang banyak terserap dalam dunia kerja di Dumai kebanyakan berasal dari luar Dumai atau pendatang. Kehadiran Caltex menyebabkan penduduk asli berangsur-angsur meninggalkan mata

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 1999-2005.

Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2002.

Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2004.

Laporan Tahunan Dinas Pasar Kota Dumai Tahun 2006.

Laporan Tahunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2004.

Monografi Kota Administratif Dumai 1984.

Monografi Kabupaten Bengkalis, 1990.

Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1994 (Bengkalis: BAPPEDA dan Kantor Statistik Kabupaten Bengkalis, 1994).

Pemerintah Provinsi Riau, *Pendapatan Regional Kabupaten/ Kota Menurut Lapangan Usaha 1997-1999* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2000).

Pemerintah Provinsi Riau, *Sumber dan Potensi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 1986* (Pekanbaru: Kerjasama BAPPEDA dengan Kantor Statistik Riau, 1986).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terbitan Berkala

Brosur Kota Dumai.

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1980).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1990).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1999)